

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gerakan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar termasuk dalam gerakan *new social movement*, karena mereka tidak berusaha merebut kursi kekuasaan dan lebih pada gerakan kolektif untuk menyelamatkan KPK dari kriminalisasi dan pelemahan terkalit konflik KPK dengan Polri jilid 3. Berdasarkan temuan Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar termasuk dalam gerakan sosial, hal ini didasari dari empat properti dasar oleh Tarrow yaitu: *pertama*, tantangan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat sipil Sumbar dalam menyelamatkan KPK. *Kedua*, tujuan bersama dari gerakan ini adalah penyelamatan KPK dari pelemahan. *Ketiga*, gerakan ini juga memiliki solidaritas dan identitas kolektif berdasarkan kesepahaman bersama memandang pelemahan terhadap KPK yang terjadi. *Keempat*, gerakan ini juga memelihara politik perlawanan dengan ditandai dengan banyak bentuk aksi yang dilakukan dan memakan banyak waktu.

Berdasarkan temuan dan analisis data, peneliti menarik beberapa kesimpulan dari proses *framing* dan mobilisasi sumberdaya yang dilakukan oleh LBH Padang dan PUSaKO Unand pada gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar dalam aksi penyelamatan KPK di Kota Padang tahun 2015; *Pertama*, *Framing* yang dilakukan oleh LBH Padang dan PUSaKO Unand berhasil dilakukan. Berangkat dari identifikasi masalah konflik KPK dengan Polri dan urgensi KPK

sebagai lembaga pemberantasan korupsi, LBH dan PUSaKO mengemas atau meringkaskan isu tersebut untuk melakukan kampanye, pencerdasan kepada masyarakat Sumatera Barat untuk melakukan dukungan kolektif terhadap KPK. Dengan strategi kampanye seperti penggalangan tanda tangan, *selfie* (swafoto) antikorupsi, dan seminar semua efektif untuk menarik partisipasi publik untuk menyebarluaskan dukungan terhadap KPK. Indikasi keberhasilan itu terlihat dari banyaknya rangkaian aksi dan bervariasi yang dilakukan di Sumatera Barat serta berhasil memotivasi masyarakat Sumbar berpartisipasi dalam gerakan penyelamatan KPK seperti ikut dalam selfie antikorupsi serta terlibat dalam memberi tanda tangan dukungan terhadap KPK.

Kedua, Upaya mobilisasi yang dilakukan Oleh LBH Padang dan PUSaKO Unand berhasil dilakukan. Berbagai elemen yang terlibat dalam gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar yang terdiri dari; akademisi dari Perguruan Tinggi di Padang, guru-guru besar, Rektor Unand; NGO seperti Walhi, LBH Pers, PBHI, Perkumpulan Qbar, YCM, Nurani Perempuan; Mahasiswa seperti, UKM PHP Unand, LAM&PK, BEM KM Unand, Mahasiswa Fakultas Hukum Unand, WP2SOSPOI UNP, BEM UNP; serta tokoh-tokoh sipil seperti Miko Kamal dan Paralegal yang merupakan masyarakat dampingan LBH Padang membuktikan adanya proses mobilisasi dan pengorganisasian yang baik yang dilakukan LBH Padang dan PUSaKO Unand.

B. Saran

1. Secara akademis

Dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian, penelitian ini baru sampai pada tahap mengidentifikasi proses *framing* dan mobilisasi sumberdaya yang dilakukan oleh LBH Padang dan PUSaKO Unand dalam gerakan KMSS dalam menyelamatkan KPK pada tahun 2015. Hendaknya peneliti selanjutnya bisa membandingkan gerakan-gerakan Antikorupsi yang dilakukan masyarakat sipil Sumbar atau membandingkan gerakan antikorupsi antara Pusat dan daerah atau gerakan antikorupsi di Sumbar dan daerah lain.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainya dalam proses penelitian ilmiah serta menjadi refleksi kritis bagi aktivis antikorupsi di Kota Padang dalam menyikapi permasalahan pelemahan KPK dan masalah korupsi baik secara nasional maupun di tingkat daerah khususnya Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar dalam upaya menyatukan visi bersama gerakan Antikorupsi di Kota Padang.